

TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2000-2013

Oleh :

Aditya Hardi Guntara

Pembimbing : Hendro Ekwarso dan Dahlan Tampubolon

Faculty Of Economic, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : aditya.guntara12@yahoo.com

*Transformation Economic Structure of the District Upstream Indragiri Year
2000-2013*

ABSTRACT

This study aims to determine whether there was a shift in the economic structure of the district Upstream Indragiri years 2000-2013. This study uses secondary data by collecting data by recording directly necessary data, both went to the Office of the Central Statistics Agency (BPS) of Riau Province and Upstream Indragir and undertakes a review of the literature, including books, journals, print media and scientific reports , Methods of data analysis using the Shift Share Analysis Classical and Shift Share Analysis modification of Esteban-Marquillas. The results of this study indicate that the economic structure of Upstream Indragiri district in 2000-2013 began to experience transformation from the primary sector to the secondary and tertiary sectors, although the level of friction is relatively small, but the structure of the economy from year to year, the agricultural sector still provides a major contribution to total GDP District Upstream Indragiri overall. Economic sectors in the district Upstream Indragiri yet has two advantages at once, but there are economic structures which have one of the two advantages, namely the sectors of processing industry and sector of electricity, gas and water supply with a competitive advantage, while the agricultural sector and the mining sector has the advantage of specialization.

Keywords :Transformation structure, GDRP, Shift Share, Base Sector, Government Policy

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, di mana masing-masing perekonomian

akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri.

Todaro (2008: 68) mengungkapkan bahwa tingkat perubahan struktural dan sektoral

yang tinggi, berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup “pergeseran” yang berangsur-angsur dari aktifitas pertanian ke sektor non pertanian dan dari industri ke jasa. Dampak pembangunan suatu daerah, seperti mengenai perubahan sektor-sektor apa yang meningkat atau menurun, merupakan pengetahuan yang penting dalam pembangunan suatu daerah.

Proses transformasi struktur ekonomi melibatkan seluruh kegiatan yang ada melalui dukungan masyarakat di berbagai sektor, sektor perekonomian daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang besar tentunya di topang oleh potensi perekonomian daerah yang ikut andil dalam proses pengembangan dan pembangunan ekonomi daerah (Setiawan, 2014). Struktur ekonomi daerah berdampak pada peningkatan sektor-sektor perekonomian lainnya yang saling berkaitan. Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila ditunjang dari segi pengetahuan masyarakat yang tinggi, adanya sumber daya alam yang cukup memadai yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mempunyai potensi besar guna tercapainya kemajuan pembangunan daerah.

Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan salah satu kabupaten pemekaran yang terdapat di Provinsi Riau memiliki luas wilayah 8.198,26 km². Kabupaten Indragiri Hulu memiliki potensi sumberdaya alam (SDA) yang besar yang menjadikan daerah ini salah satu penghasil

produk-produk perkebunan di provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki luas areal perkebunan yang terdiri dari 568,75 ha kelapa sawit, 256,28 ha karet, dan 64,35 ha aneka tanaman lain (www.inhukab.go.id, 2016).

Kabupaten Indragiri Hulu juga memiliki sumberdaya pertambangan yang cukup besar. Dibidang pertambangan, potensi terbesar adalah minyak bumi dan batu bara. Hasil lifting minyak bumi mencapai 6577.598,54 barel. Begitu juga pertambangan batu bara, tercatat total deposit batu bara di Indragiri Hulu mencapai 2.095 milyar ton yang tersebar di Kecamatan Kelayang, Pasir Penyau, Siberida, Batang Cenaku, dan Batang Gangsal. Selain kedua hasil bumi tersebut, bidang pertambangan lainnya juga terbilang menjanjikan, seperti Granit, Pasir Kwarsa, Pasir Sungai, Koalin, Bentonit, Kerikil dan sebagainya. Tidak hanya memiliki deposit yang lumayan besar, namun komoditi pertambangan ini juga memiliki kualitas yang baik (www.inhukab.go.id, 2016).

Untuk memaksimalkan peran posisi strategis perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu ini perlu pengkajian peran sektoral yang dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang strategis dan peralihan keadaan sosial yang diakibatkan oleh adanya perubahan struktur dari pembangunan yang bersifat agraris menjadi pembangunan yang industrial. Hal ini sesuai dengan konsep perubahan struktur ekonomi menurut Todaro (2006: 17-18) berupa peralihan dan pergeseran dari kegiatan sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Terjadinya transformasi struktur ekonomi di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat dari perubahan sumbangan sektor pertanian ke sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Indragiri Hulu. Selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2009 sumbangan sektor pertanian yang semula sebesar 57,08% pada tahun 2000 turun menjadi 44,48% pada tahun 2009. Sedangkan pada sektor industri selama kurun waktu yang sama pada tahun 2000, sektor ini memiliki sumbangan sebesar 15,73%, namun pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 24,08%. Berdasarkan gambaran tersebut dapat diartikan bahwa dengan semakin menurunnya sumbangan sektor pertanian (sektor primer) maka sumbangan sektor industri pengolahan (sektor sekunder) semakin meningkat dalam konteks sebuah transformasi struktur ekonomi di Kabupaten Indragiri Hulu.

Untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hulu, maka perhatian utama ditujukan untuk melihat komposisi ekonomi yakni dengan mengetahui sumbangan atau peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau sektor dalam perekonomiannya. PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Nabila, 2015).

Berdasarkan gambaran diatas tentang kondisi yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu terutama peranan sektoral dalam PDRB membuat penulis tertarik membuat penelitian ini dengan judul *“Transformasi Struktur Ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2000-2013”*

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana transformasi struktur ekonomi di Kabupaten Indragiri Hulu selama periode 2000-2013 ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Indragiri Hulu selama periode 2000-2013.

TELAAH PUSTAKA

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi adalah faktor paling penting dalam setiap usaha untuk memecahkan permasalahan kependudukan dan masalah-masalah yang saling terkait yang harus diberi prioritas dalam setiap usaha nasional maupun internasional untuk melaksanakan program-program kependudukan dan pembangunan secara terpadu (Todaro, 2005: 274). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan

institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ahli ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Dimana, kesemuanya ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Lincoln, 2004: 94).

Pada dasarnya pembangunan daerah dilakukan dengan usaha-usaha sendiri dan bantuan teknis serta bantuan lain-lain dari pemerintah. Dalam arti ekonomi pembangunan ekonomi daerah adalah memajukan produksi pertanian dan usaha-usaha pertanian serta industri dan lain-lain yang sesuai dengan daerah tersebut dan berarti pula merupakan sumber penghasilan dan lapangan kerja bagi penduduk.

Sehingga proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata, namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang penting dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan daerah disamping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi setiap daerah akan sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kuncoro, 2004: 75-77).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap yang berurutan yang dimulai dari masa berburu, masa berternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan dan tahap masa industri. Menurut teori ini masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi, pembagian tenaga kerja merupakan titik sentral dalam pembahasan teori ini, dalam upaya peningkatan produktifitas kerja.

Dalam pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan antar satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk pada fungsi kendala yaitu ketebatasan sumberdaya ekonomi (Kuncoro, 2004: 56).

Ukuran Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Ukuran-ukuran mengenai keterkaitan ekonomi pada dasarnya

menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya. Analisis *shift share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibanding perekonomian nasional. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu:

- a) Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan sektor yang sama diperekonomian yang dijadikan acuan.
- b) Pergeseran proposional mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan.
- c) Pergeseran diferensial membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang industri yang sama pada

perekonomian yang dijadikan acuan (Arsyad, 2004: 314)

Teori Pergeseran Struktur Ekonomi

Pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur perekonomian dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke sektor modern yang didominasi oleh sektor non primer, khususnya industri manufaktur dengan *increasing return to scale* (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2009: 62).

Transformasi struktural pertama kali diperkenalkan oleh Fisher pada tahun 1935. Fisher mengenalkan konsep tentang kegiatan primer, sekunder dan tertier. Sektor primer didenifikasikan sebagai kegiatan pertanian dan produksi perkebunan, serta beberapa kasus dalam kegiatan pertambangan. Sektor sekunder terdiri dari kegiatan manufaktur dan konstruksi. Kegiatan tertier terdiri atas transformasi dan komunikasi, perdagangan, pemerintahan dan jasa lainnya. Penelitian Fisher kemudian didukung oleh Clark yang merupakan dasar bagi studi-studi pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural setelah perang dunia II (Sufriadi, 2015).

Teori perubahan struktural menitikberatkan kepada pembahasan mekanisme transformasi ekonomi yang dialami negara sedang berkembang yang semula lebih

bersifat subsisten ke struktur perekonomian yang lebih modern dan didominasi oleh sektor industri dan jasa (Todaro, 2004: 133). Kuznet mengartikan perubahan struktur ekonomi yang umumnya disebut transformasi struktural sebagai rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lain dalam komposisi *agreggat demand*, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), *agreggat supply* (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979).

Teori Sektor Basis

Sektor basis adalah kegiatan ekonomi yang tidak hanya mampu menyediakan bagi pasar dalam wilayah tetapi juga bagi pasar luar wilayah tersebut, sehingga permintaan barang dan tenaga kerja sector ini bersifat eksogen. Sektor non-basis adalah kegiatan ekonomi yang hanya mampu menyediakan bagi pasar dalam wilayah sehingga permintaan barang, jasa, dan tenaga kerja terhadap sektor ini bersifat endogen (Hidayat, 2013).

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan non basis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005: 28).

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam memilih

antara kegiatan basis dan kegiatan non basis yaitu :

1. Metode Langsung

Metode langsung dapat dilakukan dengan cara survei secara langsung kepada pelaku usaha kemana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut. Dari jawaban yang mereka berikan, dapat ditentukan berapa persen produk yang dijual ke luar wilayah dan berapa persen yang di pasarkan di dalam wilayah.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung dilakukan dengan menggunakan asumsi atau disebut dengan metode asumsi. Dalam metode asumsi, berdasarkan kondisi di wilayah tersebut (berdasarkan data sekunder) adalah kegiatan tertentu yang di asumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya sebagai kegiatan non basis.

Kegiatan yang mayoritas produknya dijual keluar wilayah atau mayoritas uang masuknya berasal dari luar wilayah langsung dianggap basis, sedangkan yang mayoritas produknya dipasarkan lokal dianggap non basis. Dalam metode asumsi, kegiatan yang bukan dikategorikan basis adalah otomatis menjadi kegiatan nonbasis.

3. Metode Campuran

Metode ini dapat dilakukan dengan menggabungkan antara metode asumsi dengan metode langsung. Dalam metode campuran diadakan survei pendahuluan, yaitu pengumpulan data sekunder, biasanya dari instansi pemerintah atau lembaga pengumpulan data seperti BPS. Dari data sekunder

berdasarkan analisis ditentukan kegiatan mana yang dianggap basis dan yang nonbasis. Asumsinya apabila 70% atau lebih produknya diperkirakan dijual ke luar wilayah maka kegiatan itu langsung di anggap basis. Sebaliknya, apabila 70% atau lebih produknya dipasarkan di tingkat lokal maka langsung dianggap nonbasis.

4. Metode Location Quotient (LQ)

Metode ini membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah kita dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional.

Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah dalam suatu periode tertentu dituntunkan data PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada saat itu (Hidayat, 2013).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi Produk domestik regional Bruto adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). PDRB merupakan bentuk penyajian data yang bisa menggambarkan struktur perekonomian daerah pada tahun yang bersangkutan. Dimana dalam PDRB terdiri dari sembilan sektor yang telah menjadi sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Minum, Bangunan, Angkutan dan

Komunikasi, Perdagangan, Hotel dan Restaurant, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Sektor Jasa-jasa (Setiawan, 2014).

METODE PENELITIAN

Metodologi ini merangkumi wilayah studi, jenis dan sumber data dan metode analisis yang digunakan. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode literature, yakni menggunakan data-data sekunder dari berbagai sumber yang terkait. Analisis data yang digunakan adalah analisis shift share yang dipadukan dengan shift share esteban marquillas. Sumber data utama yang digunakan adalah PDRB Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau atas harga konstan tahun 2000.

Definisi Operasional Konsep atau Variabel

Pergeseran struktur ekonomi adalah perubahan baik pertumbuhan atau penurunan perekonomian sebuah daerah (wilayah) dari waktu ke waktu pada sektor-sektor ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Periode sebelum Tahun 1945

Zaman Sebelum Penjajahan Kolonial Belanda

Zaman sebelum VOC pemerintahan kolonial Belanda datang dan memerintah di Indonesia daerah Indragiri Hulu dan Teluk Kuantan merupakan kerajaan. Kerajaan Indragiri di perintah oleh Raja atau Sultan yang berkedudukan

di Pekan Tua yang letaknya sekitar 75 Km sebelah timur kota Rengat.

Raja pertamanya adalah Raja Kocik Mambang alias Raja Melayu I yang memerintah dari tahun 1298-1337 dan Raja yang terakhir adalah Tengku Muhammad dengan Gelar Sultan Muhammad Syeh. Wilayah kerajaan Indragiri pada waktu itu meliputi kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu sekarang, kecuali kecamatan Cerenti, Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik yang merupakan bagian dari Kerajaan Kuantan. Sedangkan kerajaan Kuantan Singingi pada waktu itu termasuk wilayah I Kerajaan Siak.

Zaman Perintahanan Kolonial Belanda

Setelah VOC pada waktu itu daerah ini dikuasai oleh pemerintah Belanda dengan nama Afdeling Indragiri yang pernah di perintah oleh seorang Afdeling yang terdiri dari :

- a) Order Afdeling/District Rengat
- b) Order Afdeling/District Tembilahan
- c) Order Afdeling/District Taluk Kuantan

Zaman Pemerintahan Fasis Jepang

Dengan kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya dan didudukinya Indonesia dan beralih kekuasaan Jepang. Dengan Indragiri pada waktu itu dibawah Fasis Jepang, penguasaannya pada waktu itu disebut Bunshiho (bupati) dan dibantu oleh Gusaibu (fatih) karna perpindahan Indragiri seakan-akan tidak ada lagi.

Periode Sesudah Tahun 1945

Dengan diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 maka di daerah-daerah dibentuk pula Lembaga ketatanegaraan yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bersifat :

- a) Penyerahan wewenang sepenuhnya baik yang menyangkut kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan
- b) Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat kepada aparat daerah
- c) Mengikuti sertakan organisasi pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah membantu urusan pemerintah pusat

Kabupaten Indragiri pada waktu itu terdiri dari 4 kewedanaan, 17 kecamatan yaitu kewedanaan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hilir Utara, Indragiri Hulu dan kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan PP nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan 4 kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri. Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 dibentuklah Provinsi Riau dengan ibukotanya Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru.

Periode Tahun 1965 Sampai Sekarang

Dengan dibentuknya Provinsi Riau dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 tersebut maka

timbulah rakyat di 2 kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri Hilir dan kewedanaan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui panitia persiapan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut dapat dukungan dari DPRD Riau DPRGR pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadi pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi 2 Kabupaten yaitu :

- a) Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan terdiri dari 8 kecamatan dan sekarang 11 kecamatan
- b) Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198,26 Km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m diatas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada 0° 15' Lintang Utara, 1° 5' Lintang Selatan, 101° 10' Bujur Timur, 102° 48' Bujur Timur.

Suhu dan kelembapan udara Kabupaten Indragiri Hulu disuatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Suhu udara maksimal pada tahun 2013 yaitu 33,0 °C, sedangkan suhu minimum berkisar pada 23,1 °C. kelembapan udara maksimum cukup tinggi yaitu 97%, sedangkan kelembapan udara minimum berkisar 59%.

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan ortographi dan

perputaran atau pertemuan arus udara, oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan stasiun pengamat. Curah hujan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 563,4 mm, kemudian curah hujan terendah adalah 25,5 mm.

Pemerintahan suatu daerah merupakan unsur penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena pemerintahan suatu daerah merupakan perencana dan penentu kebijakan suatu daerah. Kabupaten Indragiri Hulu terbagi menjadi 14 kecamatan dan 194 desa, hasil pemekaran desa dan kecamatan tahun 2006 yang sebelumnya hanya 9 kecamatan dan 172 desa. DPRD kabupaten Indragiri Hulu sebagai penyalur aspirasi rakyat beranggotakan seluruhnya 35 orang, yang terdiri dari 29 anggota dewan laki-laki dan 6 anggota dewan perempuan.

Penduduk Indragiri Hulu pada tahun 2013 sebesar 401.201 dengan penduduk laki-laki sebanyak 207.204 jiwa (51,65%) dan penduduk perempuan 193.997 jiwa (48,35%). Penduduk laki-laki di Kabupaten Indragiri Hulu lebih besar di bandingkan penduduk perempuan, dengan seks ratio di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 107 artinya terdapat 107 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Jumlah pencari kerja yang tercatat di kabupaten indragiri hulu berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan terbanyak pada pencari kerja tamat Perguruan Tinggi sebanyak 1.224 orang. Berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, perikanan, dan peternakan sebanyak 16.608 pekerja, kemudian

sektor industri pengolahan sebanyak 1.824 pekerja.

HASIL PENELITIAN

Perubahan Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2000 sampai tahun 2013 didominasi oleh dua sektor yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Kedua sektor tersebut mewakili sektor primer dan sektor sekunder kegiatan perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu.

Struktur ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu didominasi oleh sektor pertanian yang kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu rata-rata diatas 48% dari tahun 2000 hingga tahun 2013. Sektor pertanian selama ini masih memegang peranan penting bagi perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu baik pada tingkat nasional maupun regional, meskipun nilainya cenderung menurun. Ini mengindikasikan bahwa pondasi perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu masih ditopang sepenuhnya oleh sektor primer. Berdasarkan tabel PDRB Kabupaten Indragiri Hulu tentang sektor pertanian pada tahun 2013 terlihat subsektor perkebunan dan kehutanan memberikan sumbangan terbesar 14,06% dan 21,50% kepada sektor pertanian.

Sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi terbesar kedua dan peranannya cenderung naik adalah sektor industri dengan kontribusi rata-rata nya sebesar 21%. Pada tahun 2000 kontribusi sektor ini sebesar 15,75% dan terus mengalami

peningkatan hingga tahun 2013 berada di tingkat tertinggi sebesar 26.03%. di dominasi oleh sektor pertanian dan industri membuat kontribusi sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki kontribusi tidak lebih dari 10,57%. Kontribusi rata-rata sektor ekonomi peringkat tiga di Kabupaten Indragiri Hulu hanya mencapai 9.05% pada periode 2000 sampai 2013, yakni berada pada sektor perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan ini didominasi oleh subsektor perdagangan besar dan eceran yang nilainya mencapai 10,18% di tahun 2013.

Mewakili sektor tersier, sektor jasa berada pada posisi ke empat yang berkontribusi terhadap struktur ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu. Selama periode 2000 sampai 2013 kontribusi sektor jasa sebesar 9,17%, sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi sebesar 4,80% serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memiliki kontribusi sebesar 1,58%. Walaupun nilai kontribusi ketiga sektor tersebut relatif kecil terhadap PDRB, tetapi ketiga sektor tersebut terus mengalami peningkatan selama periode analisis.

Terlihat mulai terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Indragiri Hulu dari sector primer menuju sektor sekunder dari tahun 2000 sampai 2013 walaupun tingkat pergeserannya relatif kecil dan perlahan-lahan. Berdasarkan tabel dalam kurun waktu 14 tahun terlihat peranan sektor primer semakin mengalami penurunan yakni dari total kontribusi sebesar 57,08% pada tahun 2000 terus menurun pada nilai 40,48% pada tahun 2013.

Sementara pada saat yang sama terjadi peningkatan pada peranan sektor sekunder pada tahun 2000 kontribusinya hanya 15,73% dan terus mengalami peningkatan hingga 2013 dengan nilai 26,03%. Di samping itu meski tidak sebesar sektor primer, sektor tersier juga terus bergerak meningkat dari total kontribusi sebesar 12,97% pada tahun 2000 dan 15,55% pada tahun 2013.

Analisis Komponen Perubahan Struktur Ekonomi

Analisis Shift Share

Tahun 2000 sampai 2004

Dari tahun 2000 hingga 2004 terjadi pertambahan tingkat PDRB di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 735. 058, 33 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 110,53% disebabkan karena efek pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Tidak bisa dihindari bahwa kondisi perekonomian kabupaten akan dipengaruhi oleh kinerja perekonomian provinsi, nasional bahkan perekonomian global. Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan perekonomian Provinsi Riau

Tahun 2005 sampai 2009

Terjadi pertambahan tingkat PDRB di Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2005 sampai 2009 sebesar Rp. 962. 483, 35 juta. Dari jumlah tersebut sebanyak 110,18% disebabkan karena efek pertumbuhan ekonomi ditingkat provinsi, dengan sumbangan output terbesar pada sektor pertanian sebesar Rp. 500. 634, 86 juta. Hal tersebut

dikarenakan optimalisasi sumber daya pertanian secara efisien di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan prioritas :

1. Pengembangan dan peningkatan produksi serta produktifitas sector unggulan khususnya perkebunan dan tanaman pangan sebagai pemasok utama bagi kehidupan masyarakat ataupun industri dan sebagai komoditi yang kompetitif dalam persaingan pasar
2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian serta informasi pasar
3. Pengembangan dan optimalisasi lahan tidur dan lahan terlantar untuk peningkatan pertanian

Tahun 2010 sampai 2013

Pertambahan tingkat PDRB di Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2010 sampai 2013 sebesar Rp. 2. 719. 671, 25 juta. Dari jumlah tersebut sebanyak 68,89% disebabkan karena efek differensial shift, dengan sumbangan output terbesar pada sektor pertanian sebesar Rp. 1. 811. 220, 15 juta. Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2010 sampai 2013 terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu mengakibatkan pertumbuhan yang positif, yakni sebesar 35,60% atau sebesar Rp 970. 583, 23 juta, artinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu masih dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Provinsi Riau. Hal tersebut dikarenakan penguatan daya saing di

Kabupaten Indragiri Hulu, dengan prioritas :

1. Perwujudan perkembangan struktur ekonomi yang seimbang melalui penguatan sector industri yang sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan sumberdaya lainnya yang sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian
2. Perwujudan kemandirian daerah melalui pengembangan dan pendayagunaan potensi lokal, serta mengurangi ketergantungan dari luar wilayah
3. Peningkatan peran dan kontribusi Kabupaten Indragiri Hulu dalam berbagai kerjasama antar daerah dan regional.

Analisis Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi

Esteban-Marquillass (1972) berusaha mengatasi satu kelemahan dari analisis *Shift Share* klasik, yaitu masalah pembobotan yang dijumpai sebagai pengaruh persaingan sebagai komponen ketiga. Melalui analisis *Shift Share* modifikasi Esteban-Marquillass dapat dideteksi sector-sector yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi pada suatu wilayah.

Kabupaten Indragiri Hulu belum ada dektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan spesialisasi sekaligus.

Meski demikian, terdapat sektor ekonomi yang memiliki salah satu dari kedua keunggulan tersebut, yakni sektor Industry dan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yang memiliki keunggulan kompetitif dan sector Pertanian dan pertambangan yang memiliki keunggulan spesialisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap transformasi struktur ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu dengan kontribusi PDRB, analisis *Shift Share* klasik dan *Shift Share* modifikasi Esteban-Marquillass maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Analisis kontribusi PDRB Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2000-2013 menunjukkan struktur perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu mulai mengalami transformasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, walaupun tingkat pergeserannya relatif kecil. Meski tingkat pergeserannya kecil dari tahun ke tahun, perlu digaris bawahi bahwa dalam struktur perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2000-2013 sektor pertanian masih memberikan kontribusi besar terhadap total PDRB Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan.

Hasil perhitungan Shift Share Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2000-2013 diketahui sektor primer memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 32.39% atau Rp 972.664,40 juta, sektor sekunder memberikan kontribusi sebesar 50.55% atau Rp 1.517.930,28 juta, dan sektor tersier

memberikan kontribusi sebesar 17.04% atau Rp 511.886,81 juta.

Berdasarkan analisis keunggulan kompetitif dan spesialisasi *Shift Share* modifikasi Esteban-Marquillas, belum ada sektor ekonomi di Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki dua keunggulan sekaligus. Meski demikian terdapat struktur ekonomi yang memiliki salah satu dari dua keunggulan tersebut, yakni sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih yang memiliki keunggulan kompetitif, sedangkan sektor pertanian dan sektor pertambangan memiliki keunggulan spesialisasi.

Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat diajukan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi pengambilan kebijakan, saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian bahwa peningkatan investasi akan meningkatkan pertumbuhan PDRB industri, maka dengan adanya investasi baik berupa modal dan sumber daya manusia, misalnya dengan mengadakan pelatihan atau training *soft skill* sebelum bekerja pada bidang industri yang lebih spesifik maka diharapkan dapat meningkatkan produktifitas yang dihasilkan tenaga kerja. Selain itu, dengan adanya investasi khususnya sumber daya manusia diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran dan terjadi penyerapan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi sehingga meningkatkan modal

dalam sektor industri yang nantinya juga dapat meningkatkan PDRB total di Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Pertumbuhan sektor industri sangat dipengaruhi oleh keadaan fluktuasi ekonomi, karena kegiatan produksinya tergantung pada keadaan perekonomian. Jadi, diharapkan pemerintah kabupaten dapat menjaga kestabilan perekonomian daerah agar tercipta iklim ekonomi dan investasi yang kondusif sehingga kegiatan perekonomian dapat terus berkembang.
3. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya perlu ditangani dengan serius mengingat pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari urbanisasi dari luar daerah menyebabkan angka pengangguran di kabupaten bekasi cukup besar sehingga menyebabkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pun cukup terbatas. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan area penelitian dapat diperluas, tidak hanya di kabupaten yang berada di Provinsi Riau namun dapat menambahkan kabupaten lainnya yang berada di luar Provinsi Riau, sehingga lebih dapat di generalisasikan. Penelitian selanjutnya, dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap transformasi struktur ekonomi, misalnya investasi dan desentralisasi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. STIE Yogyakarta: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu. 2016. *Indragiri Hulu Dalam Angka 2012*. Kantor BPS Provinsi Riau : Pekanbaru.
- Chenery, H.B. and M. Syrquin. 1975. *Pattern of Development, 1957- 1970*, London, Oxford University Press.
- Hidayat, A.J. Januarydy. 2013. *Analisis Struktur Perekonomian di Kota Manado*. Jurnal EMBA. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi : Manado, Vol. 1, No. 3 Juni 2013, 930-938.
- Indragiri Hulu, 2016. *Potensi Daerah*. <http://inhukab.go.id/node/107>
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Lincolin, Arsyad. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. STIE Yogyakarta: Yogyakarta.
- Nabila, Hana Ainin. 2015. *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya : Malang, Vol 3, No 2.
- Setiawan, Mohammad. 2014. *Analisis Sektor Ekonomi Basis Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya : Malang, Vol. 2, No 2.
- Sufriadi, Dedi. Abubakar H. dan Sofyan S.. 2015. *Analisis Transformasi Struktural Perekonomian Aceh*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh : Banda Aceh, Volume 3, No. 2, Mei 2015, 65-73.
- Tambunan, Tulus. 2009. *Perekonomian Indonesia*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Tarigan, Drs Robinson. 2005. *Ekonomi Regional (Teori dan Aplikasi) Edisi Revisi*. Medan : Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Terjemahan Haris Munandar. Edisi Kedelapan. Erlangga: Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2005. *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*. Edisi Ketiga. Bumi Aksara: Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Jilid 1, Edisi Kedelapan. Erlangga: Jakarta.